

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Asikin Zainal, *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Asshiddiqie Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Atmadja Arifin P. Soeria, *Keuangan Publik Dalam Prespektif Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005
- Djafar Muhammad, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Elyana, *Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005
- Halim Ridwan, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Hartini Rahayu, *BUMN Persero Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017
- Hartini Rahayu, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2012
- Ibrahim Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2013
- Imaniyati Neni Sri, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu Yogyakarta, 2009
- Indradewa Jusuf L., *Pengertian Keuangan Negara Menurut Pasal 23 ayat (5) UUD 1945*, dalam buku *Kapita Selekta Keuangan Negara*, Jakarta, 1996
- Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hikum*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989 Indonesia, Jakarta, 1985
- Khairady Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FHUI Press, Yogyakarta, 2013
- Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

- Nasir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2005
- Purwosutjipto H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 2000
- Rido Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2004
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Suyuthi Wildan, *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Tatanusa, Jakarta, 2004
- Syahrani Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata Edisi Cetakan Ketiga*, Alumni, Bandung, 2006
- Tutik Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
- Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 4297)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 4756)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT

Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-101/MBU/20002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 77/PUU/IX/2011

Internet

Meski Pengadilan Nyatakan Pailit, Aset BUMN Tak Akan Mudah Disita, www.hukumonline.com, 28 September 2018, dikunjungi pada tanggal 18 September 2019

Jurnal

Bismar Nasution,dkk, *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Terhadap Aset BUMN*, Usu Law Journal Vol.3 No.1 , 2015

Fahriza Nurul Safitri, *Kepailitan terhadap BUMN*, Tesis, Universitas Indonesia, 2012

Giska Hermiana, *Analisis Yuridis Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011 Terhadap Pengaturan Piutang BUMN Dalam Hal Permohonan Restrukturasi Utang oleh Debitor* , *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 2013.

Muhammad Ramdhani, *Tinjauan Yuridis Mengenai Syarat Sahnya Pailit Terhadap BUMN Sesuai dengan UU Kepailitan Pada Kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia*, Tesis, Universitas Indonesia, 2010.

Multazam Maja Mahardi, *Status Kepemilikan Harta Kekayaan (Aset) BUMN Terhadap Ketentuan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara*, Tesis, Universitas Airlangga, 2016.

Riyanita Prasetya, dkk, *Implikasi Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011 Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Negara Pada Bank Badan Usaha Milik Negara*, *Samudra Keadilan Vol No.II*,2016